



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 15 Februari 2019

Nomor : 49 /BUA.4/PL.07/02/2019

Lampiran : satu set

Perihal : Permintaan Dokumen Pemeriksaan BPK RI

Yth. 1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;

2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;

6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau

di tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 01/LK-MA/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 224/SEK/KU.00/02/2015 tanggal 14 Februari 2019 tentang hal yang sama, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk Satuan Kerja Eselon 1 dan Koordinator Wilayah untuk bisa mempersiapkan dan memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Eselon 1, menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dari satuan kerjanya sendiri;
2. Koordinator Wilayah untuk melakukan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan tersebut dari satuan kerja di wilayahnya masing-masing;
3. Koordinator Wilayah untuk mengkompilasi dokumen dari satuan kerja di wilayahnya dengan pola penyimpanan file sesuai dengan petunjuk pada lampiran surat ini;
4. Dokumen yang dibutuhkan tersebut dibuatkan dalam bentuk *Softcopy*, yaitu untuk daftar aset sewa, daftar kendaraan, daftar tanah dan daftar bangunan dalam bentuk *excel (.xlsx)* dan untuk dokumen yang lainnya dalam bentuk *(.pdf)*;
5. Dokumen tersebut sudah kami terima paling lambat Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019, disampaikan melalui email : ikn.rokap.mari@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI;